

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.¹ Bantuan luar negeri secara umum dapat berupa transfer uang, barang dan jasa dari pemerintahan suatu negara kepada pemerintahan negara lainnya. Konsep bantuan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri telah digunakan oleh banyak negara sejak berakhirnya Perang Dunia II, khususnya negara-negara adidaya.²

Sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, pemberian bantuan luar negeri pada prakteknya selalu diikuti oleh kepentingan negara donor dengan motivasi yang beragam seperti yang dilakukan oleh negara-negara donor tradisional diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan lainnya.³ Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri untuk mempromosikan demokrasi di negara-negara miskin dan berkembang,⁴ Jepang menggunakan sebagian besar bantuan luar negerinya untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara berkembang untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan antara Jepang dengan

¹ Sara Lengauer. *China's foreign aid policy: Motive and method*. The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol 9, Issue 2, 2011, hal. 1

² Sara Lengauer, 2011, hal. 1

³ Carol Lancaster, *Foreign Aid. Diplomacy, Development, Domestic Politics*. University of Chicago Press, 2007, hal. 5-7.

⁴ Carol Lancaster, 2007, hal. 6

negara-negara berkembang, sedangkan Perancis memberikan bantuan luar negeri dengan motivasi diplomatik.⁵

Dalam beberapa dekade terakhir ini bantuan luar negeri semakin berkembang, tidak hanya diberikan oleh negara-negara adidaya yang merupakan donor tradisional saja, tetapi juga bermunculan negara-negara donor baru yang mulai memainkan peran besar dalam aliran bantuan luar negeri secara global, salah satu negara yang paling terdepan diantaranya adalah Tiongkok.

Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Meskipun Tiongkok saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang, namun Tiongkok saat ini sudah melewati Jerman sebagai negara eksportir terbesar di dunia dan Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.⁶ Selain itu, Tiongkok juga telah melewati Amerika Serikat sebagai negara konsumen energi terbesar di dunia yang sekaligus menandakan tingginya kebutuhan energi Tiongkok saat ini karena produktifitas yang sangat pesat.⁷ Kemajuan ekonomi Tiongkok membuat negara ini semakin aktif melibatkan diri dalam aktifitas hubungan internasional dengan negara lain, termasuk dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin dan berkembang di berbagai kawasan di dunia.

Sama halnya dengan negara donor tradisional, Tiongkok juga menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan luar

⁵ Carol Lancaster, 2007, hal. 6

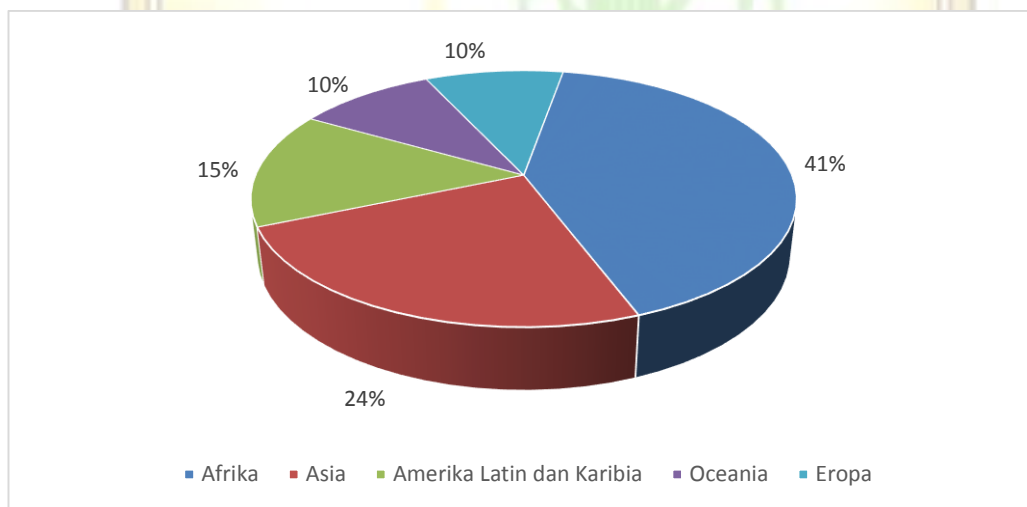
⁶ Sara Lengauer, 2011, hal. 35

⁷ Sara Lengauer, 2011, hal. 35

negerinya. Oleh karena itu, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok juga berdasarkan motivasi dan kepentingan tertentu.

Saat ini Tiongkok telah memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang hampir di seluruh kawasan di dunia, seperti kawasan Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia. Jika dijumlahkan, Tiongkok telah memberikan bantuan luar negeri kepada 161 negara di seluruh dunia. 30 diantaranya adalah negara yang berada di kawasan Asia, 51 negara Afrika, 18 negara Latin Amerika dan Karibia, 12 negara Oceania dan 12 negara Eropa Timur.⁸ Distribusi pemberian bantuan luar negeri Tiongkok dapat dilihat dalam diagram lingkaran di bawah ini:

Diagram 1.1: Distribusi Bantuan Luar Negeri Tiongkok Secara Geografis



Sumber: State Council Information Office of the PRC, 2011, *“White Paper on China’s Foreign Aid”*.

Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa negara-negara di kawasan Afrika merupakan negara-negara yang paling banyak menerima bantuan luar negeri dari

⁸ State Council Information Office of the PRC, 2011, *“White Paper on China’s Foreign Aid”*.

Tiongkok. Namun Tiongkok juga memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga menempatkan kawasan Asia di posisi kedua dalam diagram distribusi bantuan luar negeri Tiongkok dan diikuti oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia, Oceania dan lainnya.

Dalam mendukung pembangunan negara-negara berkembang, Tiongkok mendistribusikan bantuan luar negerinya di berbagai sektor, seperti sektor infrastruktur ekonomi, industri, pertanian, fasilitas umum dan lain-lain. Pendistribusian bantuan luar negeri untuk berbagai sektor yang berbeda ini juga sekaligus mencerminkan pentingnya sektor tertentu bagi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya.

Sekitar 65 persen bantuan luar negeri Tiongkok diberikan kepada Asia dan Afrika yang merupakan dua kawasan yang paling penting bagi Tiongkok dan sebagian besarnya dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur, seperti proyek infrastruktur transportasi, pertanian, energi, komunikasi dan sarana umum lainnya. Sebagian besar negara penerima terbanyak bantuan luar negeri Tiongkok adalah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, batubara, permata dan emas, seperti negara-negara Afrika, khususnya Angola yang merupakan negara yang paling banyak menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok untuk kawasan Afrika. Saat ini Angola telah menerima lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat bantuan luar negeri dari Tiongkok sejak tahun 2000, diikuti oleh Sudan, Ghana dan Ethiopia yang menerima bantuan kurang lebih sebesar 10 miliar

dolar Amerika Serikat pada periode yang sama.⁹ Selain untuk mengamankan sumber daya alam di Afrika, aliran dana dari Tiongkok ke negara-negara Afrika juga menciptakan kesempatan bisnis untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti perusahaan konstruksi, perusahaan jasa kontraktor dan lain lain.

Di kawasan Asia, pembangunan bantuan luar negeri Tiongkok paling banyak dialirkan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena kawasan ini berbatasan langsung dengan Tiongkok dan merupakan kawasan yang paling penting bagi Tiongkok secara geopolitik.¹⁰ Sebagai kawasan yang berdekatan dengan Tiongkok, Asia Tenggara memang memiliki arti khusus bagi Tiongkok. Meskipun hubungan Tiongkok dengan beberapa negara Asia Tenggara tidak selalu berjalan dengan baik, namun Tiongkok tetap konsisten dalam memberikan porsi bantuan luar negeri yang besar untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa dekade Tiongkok telah menjadi negara donor bagi Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Indonesia dan Filipina. Beberapa negara Asia Tenggara memang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pembangunan di negara-negara tersebut. Tetapi jumlah bantuan luar negeri Tiongkok kepada Kamboja adalah yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang juga menerima bantuan dari Tiongkok.¹¹

⁹ *Visualizing China's Aid to Africa* <https://www.chinafile.com/infographics/visualizing-chinas-aid-africa> diakses pada 26 Januari 2017.

¹⁰ John F. Copper, *China's Foreign Aid and Investment Diplomacy II*. (New York: Palgrave Macmillan) 2016, hal. 1.

¹¹ John D. Ciorciari, *China and Cambodia: Patron and Client*, Gerald R. Ford School of Public Policy University of Michigan, 2013, hal. 11

Kamboja merupakan negara dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara.¹² Kamboja juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri, sehingga sejak awal kemerdekaannya sampai sekarang Kamboja masih sangat bergantung kepada bantuan dari asing. Dari segi perekonomian, Kamboja hanya bergantung kepada hasil alam di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Kamboja bekerja sebagai petani dan hampir 90 persen pendapatan nasional Kamboja juga berasal dari sektor pertanian. Kamboja tidak tergolong sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Sumber minyak dan mineral Kamboja tidak berlimpah seperti yang dimiliki oleh negara-negara Afrika dan lainnya yang menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok. Namun negara yang terletak di tengah daratan utama Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan ini dianugrahi dengan tanah yang subur dan sungai-sungai besar yang sangat mendukung pertanian Kamboja. Adapun dengan potensi yang demikian, Kamboja belum mampu mengelola sendiri potensi yang dimilikinya, sehingga negara ini sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut.

Sebagai negara yang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan bantuan luar negeri, banyak negara dan organisasi internasional yang memberikan bantuan kepada Kamboja. Bantuan luar negeri Kamboja berasal dari berbagai sumber, seperti dari Jepang, Amerika Serikat, *Asian Development Bank* (ADB), Australia, Korea Selatan, Perancis, Bank Dunia, *Global Fund*, India, Tiongkok, dan

¹² Thomas Lum, *Cambodia: Background and US Relations*. Congressional Research Service Report, 2007, hal. 7

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹³ Namun sejak tahun 2009 Tiongkok menjadi pendonor terbesar bagi Kamboja hingga saat ini.¹⁴ Jumlah bantuan dari Tiongkok untuk Kamboja dalam sepuluh tahun terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan bantuan luar negeri dari donor lainnya. Bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Kamboja didistribusikan untuk beberapa sektor, seperti sektor pertanian, pengembangan energi, pendidikan dan kebudayaan, infrastruktur dan sektor lainnya, namun porsi terbesar dari bantuan luar negeri Tiongkok ke Kamboja diberikan untuk pembangunan infrastruktur di Kamboja, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan.¹⁵

Sejak Kamboja merdeka pada tahun 1953 hingga saat ini Kamboja masih memiliki banyak persoalan, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah negara. Untuk transportasi darat, Kamboja belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan perkotaan dan jalan perdesaan. Masih banyak jalan di Kamboja yang belum beraspal, khususnya jalan di daerah pinggiran kota dan jalan jalan perdesaan di Kamboja. Keadaan jalan seperti ini berdampak sangat signifikan terhadap kelancaran akses transportasi dan perekonomian di Kamboja. Selain sektor transportasi, Kamboja juga masih perlu memperbaiki dan membangun infrastruktur di sektor lainnya, seperti pertanian, energi, komunikasi dan lain-lain.

¹³ Thomas Lum, 2007, hal. 9

¹⁴ Pheakdey Heng, *Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 31 (2), 2012 hal. 60.

¹⁵ East Asia Forum: *Chinese Investment and Aid in Cambodia Controversial Affair*

Tiongkok dan Kamboja memiliki hubungan yang erat, meskipun kedua negara sempat mengalami hubungan yang fluktuatif. Tiongkok telah mulai memberikan bantuan luar negeri kepada Kamboja sejak tahun 1956.¹⁶ Namun bantuan luar negeri dari Tiongkok kepada Kamboja sempat terputus akibat pergolakan politik di Kamboja dan diperparah oleh situasi politik global yang tengah berada pada Perang Dingin hingga tahun 1990 dan kembali memberikan bantuan dalam bentuk baru yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di Kamboja pada awal dekade 2000an.

Pada tahun 2004, Tiongkok memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada Kamboja untuk pertama kali pasca kembalinya Tiongkok memberikan bantuan luar negeri kepada Kamboja. Tiongkok memberikan bantuan dana untuk proyek infrastruktur dengan total sebesar 63,4 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah Kamboja di tahun 2004, yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak sebesar 61 juta dolar Amerika Serikat dan hibah sebesar 2,4 juta dolar Amerika Serikat dan 225 juta yuan (29,2 juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2005.¹⁷

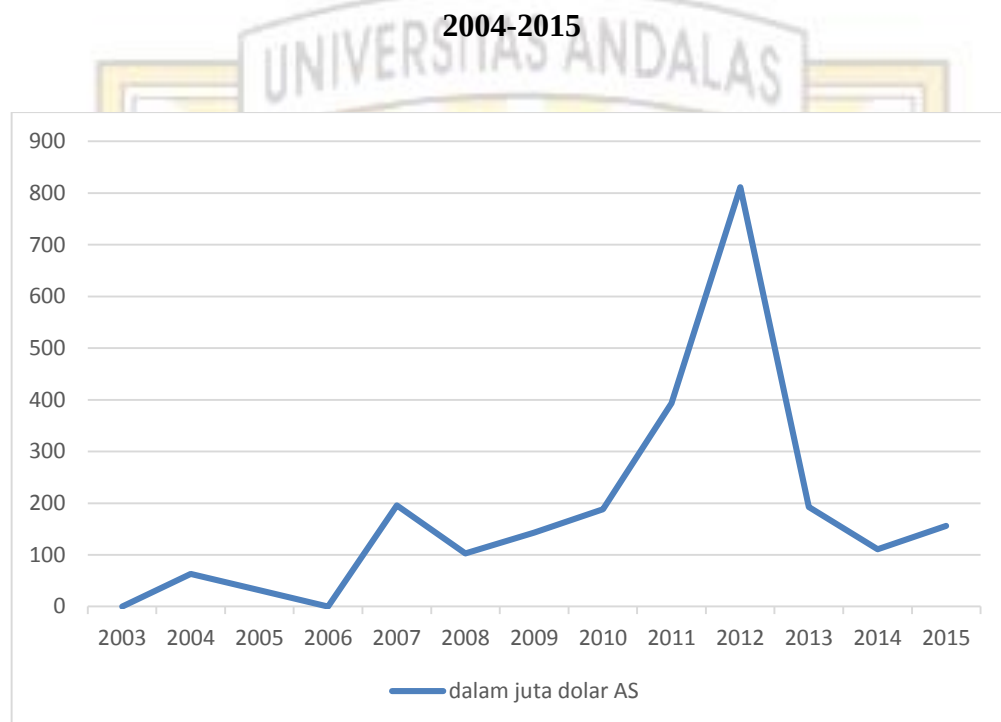
Sejak tahun 2004, Kamboja terus menerima bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah Tiongkok meskipun jumlah bantuan yang diberikan tidak selalu stabil setiap tahunnya. Namun pada tahun 2011, jumlah bantuan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan semakin meningkat drastis hingga mencapai

¹⁶ Marsot, *China's Aid to Cambodia*. Pacific Affairs, 1969, 42(2), hal. 189-198.

¹⁷ Situs resmi Cambodia Development Council, *The Cambodia ODA Database*, <http://www.cdc-crdb.gov.kh/> diakses pada 03 Agustus 2016

puncaknya pada tahun 2012 dengan jumlah bantuan untuk pembangunan infrastruktur dengan total sebesar 778 juta dolar Amerika Serikat dan 209 juta yuan (33,1 juta dolar Amerika Serikat) dalam bentuk pinjaman lunak.¹⁸

Diagram 1.2 Bantuan Infrastruktur Tiongkok Kepada Kamboja dari Tahun



Sumber: Cambodia Development Council, *The Cambodia ODA Database*, <http://www.cdc-crdb.gov.kh/>

Besarnya bantuan luar negeri dari Tiongkok untuk Kamboja sekaligus menandakan bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedekatan hubungan antara Tiongkok dan Kamboja semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 23 April 2015, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, secara khusus menemui Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen di *Asian-African Summit* di Jakarta dalam perayaan *the 60th anniversary of Bandung Conference*. Xi Jinping menyatakan dalam pertemuan khususnya dengan Hun Sen akan pentingnya

¹⁸ Cambodia Development Council

Kamboja bagi Tiongkok dan keinginan Tiongkok untuk terus menjalin hubungan baik dengan Kamboja dan ingin terus mendukung pembangunan di Kamboja, berikut penggalan pernyataan Xi Jinping.¹⁹

The China-Cambodia relations are now blessed with vital development opportunities. China will unwaveringly advance comprehensive strategic cooperation with Cambodia and firmly support Cambodia's efforts to maintain stability and development. China and Cambodia should maintain close high-level exchanges, deepen exchange of experience in governance and administration of state affairs, bring the role of China-Cambodia Inter-governmental Coordination Committee into full play, facilitate collaboration in traditional fields, boost cooperation in infrastructure connectivity within the framework of the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road initiatives and maintain proper operation of the Sihanoukville Port Special Economic Zone. China will continue offering assistance within its capacity for Cambodia's economic and social development

Dari pernyataan Presiden Xi Jinping tersebut dapat dilihat bahwa Tiongkok bersedia untuk terus mendukung Kamboja dalam meningkatkan pembangunan negaranya dan memperlihatkan bahwa Kamboja adalah mitra penting Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Presiden Xi Jinping juga mengungkapkan bahwa Tiongkok akan memberikan bantuan untuk pembangunan Kamboja melalui berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur di Kamboja.

Menanggapi pernyataan dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Hun Sen juga mengungkapkan pandangan Kamboja terhadap Tiongkok dan kesiapan Kamboja untuk melanjutkan kerjasama dengan Tiongkok, berikut penggalan pernyataan Perdana Menteri Hun Sen:²⁰

The Cambodian side stands ready to continue working with China to carry forward the traditional bilateral friendship jointly forged and nurtured by the older generations of the leaders of the two countries. At present, the two countries maintain a sound communication in various fields. Cambodia hopes to continue pushing forward mutually beneficial cooperation with China in social and economic development areas. It is hoped that the two nations could boost connectivity construction of water and aerial transport infrastructure and expand the cooperation in such areas as health care, agriculture and disaster relief

¹⁹ Situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, *Xi Jinping Meets with Prime Minister Hun Sen of Cambodia* http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1307080.shtml diakses pada 14 Maret 2017

²⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok

under the Belt and Road framework. Cambodia will maintain communication and coordination with China on regional and global issues of common concern and support the dialogue and cooperation between the ASEAN nations and China

Tanggapan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memperlihatkan bahwa pemerintah Kamboja menyambut baik keinginan Tiongkok untuk sama-sama berkomitmen dalam menjalin hubungan baik antara Tiongkok dan Kamboja. Pemerintah Kamboja juga dengan senang hati menerima bantuan selanjutnya yang akan diberikan oleh Tiongkok untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan di Kamboja.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa penting untuk melihat motivasi Tiongkok dalam pemberian bantuan infrastruktur kepada Kamboja.

1.2 Rumusan Masalah

Kamboja merupakan salah satu negara yang paling miskin di dunia. Negara yang terletak di jantung daratan utama Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri. Sejak awal kemerdekaannya, Kamboja menjadi negara yang banyak menerima bantuan dari asing karena keterbatasannya dalam berbagai hal. Namun dalam satu dekade terakhir, Tiongkok secara besar-besaran memberikan bantuan dengan jumlah yang besar kepada Kamboja untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kamboja. Berbeda dengan negara penerima donor lainnya, Kamboja tidak memiliki banyak sumber daya energi dan mineral yang biasanya menjadi sasaran utama Tiongkok dalam memberikan bantuan yaitu untuk mengamankan sumber daya dan energi disana, seperti di negara-negara Afrika.

Meskipun tidak memiliki sumber daya minyak dan mineral yang berlimpah, Tiongkok hingga saat ini masih tetap konsisten dalam memberikan bantuan kepada Kamboja dengan nilai yang fantastis, terutama untuk sektor infrastruktur yang memperoleh porsi terbesar dari bantuan luar negeri Tiongkok untuk Kamboja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah apa motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada Kamboja?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi pemerintah Tiongkok dalam pemberian bantuan infrastruktur kepada Kamboja.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan infrastruktur kepada Kamboja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dalam membuka wawasan pembaca terutama para penstudi Hubungan Internasional terkait motivasi dalam pemberian bantuan luar negeri dari Tiongkok.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti berusaha untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Adapun beberapa kajian pustaka

yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian adalah yang pertama tulisan dari Sara Lengauer yang berjudul *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*.²¹ Dalam tulisannya tersebut Lengauer menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara saat ini, termasuk Tiongkok yang merupakan negara donor baru yang paling terdepan diantara negara donor baru lainnya. Lengauer menjabarkan dalam tulisannya bahwa prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini adalah untuk menjaga Republik Rakyat Tiongkok yang merdeka, kuat dan bersatu, agar dapat mencapai tujuan utamanya yaitu pembangunan ekonomi. Menurut Lengauer, kebijakan Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain sejalan dengan prioritas utama kebijakan luar negeri Tiongkok sendiri. Hal ini sekaligus menentukan arah motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri dan cara Tiongkok dalam implikasinya.

Lengauer menjabarkan dalam tulisannya bahwa Tiongkok saat ini sudah memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara miskin dan berkembang di berbagai kawasan di dunia seperti Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia yang juga terdiri dari berbagai macam bentuk bantuan luar negeri dan juga didistribusikan untuk berbagai macam sektor. Dalam penelitiannya, Lengauer melihat bahwa saat ini Tiongkok memprioritaskan bantuan luar negerinya untuk negara-negara yang kaya akan sumber daya alam karena kebutuhan Tiongkok akan sumber daya alam sangat tinggi. Oleh sebab itu, kebutuhan Tiongkok yang sangat

²¹ Sara Lengauer, *China's foreign aid policy: Motive and method*. The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol 9, Issue 2, 2011.

tinggi akan sumber daya alam ini menjadi alasan kuat bagi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan alokasi dan bentuk bantuan luar negeri yang akan diberikan oleh Tiongkok.

Lebih lanjut Lengauer menemukan bahwa terdapat beberapa motivasi utama Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara berkembang, yaitu:

1. Motivasi ekonomi: pengamanan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara dan mineral lainnya, termasuk untuk menembus pasar konsumen dan untuk meningkatkan perdagangan.
2. Motivasi politik: membangun diplomasi strategis.
3. Motivasi ideologis: penyebaran ideologi komunis, penyebaran nilai-nilai confusianisme dan peningkatan *soft power* Tiongkok.

Dalam tulisannya mengenai motivasi dan metode Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri, Lengauer menyimpulkan bahwa motivasi ekonomi dan komersial merupakan motivasi utama Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya secara umum. Namun demikian Tiongkok tetap memiliki berbagai motivasi berbeda di setiap kawasan dan negara dalam memberikan bantuan luar negerinya. Perbedaan penelitian ini dengan *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method* adalah pada batasan masalah penelitiannya. Jurnal tersebut hanya memaparkan motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar

negeri kepada negara resipiennya diseluruh kawasan di dunia secara umum tanpa ada batasan penelitian di negara atau kawasan dan sektor tertentu.

Kajian pustaka selanjutnya adalah *The Foreign Aid Philosophy of a Rising Asian Power: A Southeast Asian View* oleh Dennis D Trinidad.²² Dalam tulisannya, Dennis D Trinidad menyebutkan bahwa bantuan luar negeri dari Tiongkok adalah bantuan luar negeri yang paling diminati oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini. Menurutnya hal ini terjadi karena bantuan luar negeri Tiongkok menawarkan suatu hal yang berbeda dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor lainnya terutama negara donor tradisional. Tiongkok menawarkan bantuan melalui pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari pada negara donor lainnya. Selain itu, bantuan luar negeri Tiongkok sebagian besar diberikan untuk proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara penerimanya, sehingga bantuan luar negeri Tiongkok ini menjadi sangat penting bagi pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang.

Selain perbedaan dari segi bentuknya, bantuan luar negeri Tiongkok juga berbeda dari bantuan luar negeri dari donor lainnya dari segi karakter dan prinsipnya. Bantuan luar negeri Tiongkok biasanya diberikan tanpa syarat politik tertentu dan tidak digunakan sebagai alat untuk mengharuskan negara penerima untuk mengadopsi suatu model pembangunan tertentu seperti demokrasi yang ditekankan oleh negara-negara donor dari *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD). Perbedaan penelitian ini dengan *The Foreign Aid*

²² Dennis D Trinidad, *The Foreign Aid Philosophy of a Rising Asian Power: A Southeast Asian View* dalam Yasutami Shimomura et al. *A Study of China's Foreign Aid An Asian Perspective*, Palgrave Macmillan, New York, 2013, hal 19-42.

Philosophy of a Rising Asian Power: A Southeast Asian View adalah jurnal tersebut hanya mendeskripsikan secara umum mengenai bantuan luar negeri Tiongkok kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kajian pustaka berikutnya adalah *China's Soft Power in CLMV: Characteristics, Motivations and Challenges* oleh Hang Vuthikaa.²³ Dalam penelitiannya, Vuthikaa menemukan bahwa *soft power* yang digunakan oleh Tiongkok terhadap Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) adalah *cultural diplomacy*, *engaging diplomacy* dan *economic diplomacy*. Dalam hal *cultural diplomacy*, *soft power* Tiongkok dapat dilihat melalui penyebaran budaya dan tradisi dari sekitar tiga juta warga Tiongkok yang saat ini tinggal di CLMV. Kemudian untuk *engaging diplomacy*, menurut Vuthikaa, Tiongkok menjadikan prinsip-prinsip penting serta kebijakan yang digunakan oleh Tiongkok dalam hubungan internasionalnya seperti *the Five Principles of Peaceful Co-Existence*, kebijakan *Non Interference*, kerjasama yang saling menguntungkan, *Good Neighbor* dan *Peaceful Rise/Development*. Namun satu hal yang paling signifikan yang digunakan oleh Tiongkok dalam memperkuat *soft power*nya di CLMV adalah melalui *economic diplomacy* yang berupa bantuan luar negeri, investasi dan perdagangan antara Tiongkok dengan CLMV.

Menurut Vuthikaa, bantuan luar negeri dari Tiongkok kepada CLMV yang terdiri dari pinjaman bunga rendah, hibah dan berbagai bantuan lainnya memiliki peran yang signifikan dalam penguatan *soft power* Tiongkok di CLMV. Dalam

²³ Hang Vuthikaa, *China's Soft Power in CLMV: Characteristics, Motivations and Challenges*. Royal University of Phnom Penh, 2014.

waktu singkat, Tiongkok menjadi sumber utama pemberi bantuan luar negeri dan investasi bagi CLMV yang sekaligus menjadi mitra dagang terbesar mereka dibawah strategi *Going Global* yang dilakukan oleh Tiongkok. Meskipun informasi mendanai investasi Tiongkok terbatas, namun saat ini 35 persen dari total investasi di kawasan Asia Tenggara berasal dari Tiongkok. Berbeda dengan perusahaan swasta milik Amerika Serikat, modal finansial, teknologi, dan tenaga ahli yang terlibat dengan investasi Tiongkok di luar negeri berasal dari perusahaan perusahaan BUMN besar Tiongkok. Perbedaan penelitian ini dengan *China's Soft Power in CLMV: Characteristics, Motivations and Challenges* adalah jurnal tersebut lebih menjelaskan keuntungan yang diperoleh Tiongkok yaitu peningkatan *soft power* nya dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Kajian pustaka selanjutnya adalah *Rogue Aid*²⁴ oleh Moisés Naím yang membahas mengenai bantuan tanpa syarat yang diberikan Tiongkok kepada Nigeria juga memiliki motivasi tertentu yang tentu saja menguntungkan bagi pihak Tiongkok. Pada dasarnya bantuan tersebut bukanlah bantuan yang murni bersifat cuma-cuma dan tanpa syarat, walaupun yang diperlihatkan adalah hal seperti itu. Tiongkok berusaha untuk menyebarkan mata uangnya di negara-negara Afrika sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai alat tukar internasional seperti dolar pada saat ini. Sebagai negara yang mengalami perkembangan industri yang pesat, Tiongkok tentu saja membutuhkan pasokan bahan baku yang berasal dari luar negaranya. Sejalan dengan hal ini, Nigeria merupakan salah satu negara Afrika

²⁴ Moisés Naím, *Rogue Aid* http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/02/14/rogue_aid?page=full diakses pada 18 Februari 2017

yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang bisa menguntungkan Tiongkok. Selain itu, penyebaran politik juga menjadi hal yang penting bagi Tiongkok yang telah diprediksi menjadi kekuatan baru di dunia.

Negara pendonor maupun negara yang mendapatkan bantuan pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari serah terima bantuan yang dilaksanakan. Bantuan luar negeri memiliki azas timbal balik, yang mana secara historis sulit untuk ditemukan fakta bahwa bantuan yang diberikan hanya berdasarkan kebaikan negara pendonor semata. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu terutama ialah *self-interest* politik, strategi dan ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa moral atau kemanusiaan. Jadi sulit ditemukan adanya bantuan yang diberikan tanpa dilandasi oleh kepentingan. Perbedaan penelitian ini dengan kajian pustaka ini adalah jurnal tersebut membahas bantuan luar negeri dan motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri di Nigeria yang merupakan salah satu negara Afrika yang paling banyak menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok.

Kajian pustaka selanjutnya adalah tulisan dari Carol Lancaster yang berjudul *Foreign Aid in the Twenty First Century. What Purpose?*²⁵ Dalam tulisannya tersebut Lancaster menjelaskan bahwa bantuan luar negeri biasanya diberikan oleh negara-negara Barat, Amerika Utara, dan Jepang yang tergabung dalam *Development Assistance Committee* (DAC) yang merupakan negara-negara anggota dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

²⁵ Carol Lancaster, *Foreign Aid in the Twenty First Century. What Purpose?* Dalam Louis A Picard et al. *Foreign Aid and Foreign Policy Lesson for the Next Half Century*. New York, National Academy of Public Administration, 2008, hal 39-59.

Tujuan utama pemberian bantuan luar negeri pada satu setengah abad pertama munculnya bantuan luar negeri adalah untuk bantuan kemanusiaan, pembangunan, diplomasi dan perdagangan. Namun saat ini pada abad ke-21, bantuan luar negeri telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga tujuan negara dalam memberikan bantuan luar negeri semakin beragam.

Lancaster juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki tujuan masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Lancaster memberikan contoh Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan bantuan luar negeri untuk diplomasi dan pembangunan, kemudian Jepang yang menggabungkan diplomasi dengan perdagangan, dan Denmark memberikan bantuan untuk pembangunan dan perluasan pasar Denmark di luar negeri. Meskipun di awal Lancaster menyebutkan OECD sebagai organisasi yang terdiri dari kumpulan negara-negara yang aktif memberikan bantuan luar negeri, namun Lancaster juga menyebutkan bahwa banyak negara-negara baru yang mulai aktif berkontribusi untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara miskin dan berkembang seperti Tiongkok dan beberapa negara berkembang lainnya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara.²⁶ Secara umum, bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari suatu

²⁶ Sara Lengauer, 2011, hal. 1

pemerintahan yang merdeka kepada pemerintahan lain yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya. Bantuan luar negeri dapat berupa barang, jasa atau dana. Bantuan luar negeri biasanya sering dijadikan sebagai simbol atau sinyal politik antara donor (negara atau organisasi internasional) dengan resipien (negara penerima bantuan).

Dalam arti sempit, bantuan luar negeri didefinisikan oleh Robert Gilpin, seorang pakar Ilmu Hubungan Internasional dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of International Relations* sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif kaya atau maju kepada negara berkembang atau miskin.²⁷ Sedangkan dalam arti luas, bantuan luar negeri didefinisikan oleh K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *International Politics: Framework of Analysis* sebagai transfer uang, teknologi, ataupun bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima.²⁸

Pada prakteknya, biasanya negara donor memberikan bantuan luar negeri secara bilateral kepada negara-negara penerima bantuan luar negeri, namun terkadang negara-negara donor juga menyalurkan bantuan secara multilateral melalui institusi internasional seperti *World Bank, the IMF, the African, Asian, Inter-American Development Banks* dan badan-badan PBB,²⁹ yang mana bantuan luar negeri terlebih dahulu dikumpulkan oleh negara-negara donor di institusi tertentu sebelum diberikan kepada negara penerima. Sebagian besar bantuan luar

²⁷ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press, 1987, hal. 311

²⁸ K.J. Holsti, *International Politics: Framework of Analysis*, New Jersey, 1995.

²⁹ Steven Radelet, *A Primer of Foreign Aid*, Working paper number 92, July 2006, hal 5

negeri dirancang untuk mencapai salah satu atau keseluruhan tujuan pembangunan dan ekonomi secara umum, seperti (1) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian dukungan terhadap sektor-sektor produktif seperti agrikultur, ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau sistem politik, (3) untuk mendukung pemberian bantuan berupa makanan atau komoditas lainnya ketika sedang dilakukan pemulihan atau ketika terjadi krisis kemanusiaan, (4) untuk membantu menstabilkan ekonomi pasca guncangan ekonomi.³⁰

Bantuan luar negeri digolongkan kedalam tiga jenis bantuan, yaitu:³¹

1. Bantuan finansial (*financial aid*)

Bantuan finansial dapat berupa bantuan *concessional* atau bantuan *non-concessional*. Bantuan *concessional* merupakan hibah atau pinjaman lunak bersubsidi (dengan elemen hibah sebesar 25%), sedangkan bantuan *non-concessional* adalah pinjaman yang mempengaruhi pasar. Bantuan finansial juga terdiri dari dua bentuk, yaitu:

A) Bantuan proyek (*project aid*) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan untuk membiayai proyek tertentu baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru. Bantuan proyek dapat menggunakan sistem pemerintah, pemerintah negara penerima dapat ikut

³⁰ Steven Radelet, 2006, hal. 7

³¹ Andy Sumner and Richard Mallet, *The Future of Foreign Aid*. Palgrave Macmillan 2013, hal. 15

serta dalam pembiayaan proyek tersebut atau sepenuhnya diserahkan kepada swasta atau NGOs.

B) Bantuan program (*program aid*) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan untuk melakukan kegiatan di area atau sektor tertentu seperti sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya.

2. Bantuan non finansial (Non financial aid)

Bantuan non-finansial berupa bantuan yang diberikan oleh pemerintah donor dalam bentuk barang atau jasa. Bantuan non finansial dapat berupa:

A) Bantuan teknis (*Technical assistance*)

Bantuan berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan yang diberikan oleh pemerintah donor kepada negara penerima bantuan. Inti dari bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

B) Bantuan makanan (*Food aid*)

Bantuan berupa makanan atau bahan kebutuhan pangan yang diberikan oleh pemerintah donor kepada negara penerima bantuan terutama ketika terjadi krisis kemanusiaan atau sedang dalam operasi pemulihan dari bencana.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu bagian dari strategi penting suatu negara. Oleh karena itu keputusan dalam memberikan bantuan luar negeri membutuhkan perhitungan yang sangat matang baik bagi negara donor maupun negara penerima karena kedua pihak pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari bantuan luar negeri dan masing-masing pihak juga memiliki tujuan dalam memberikan atau menerima bantuan luar negeri.

1.7.2 Motivasi Bantuan Luar Negeri

Motivasi merupakan atribut yang sangat penting dalam bantuan luar negeri. Motivasi bantuan luar negeri menjadi dorongan bagi negara donor untuk memberikan bantuan luar negerinya kepada negara penerima yang sekaligus merefleksikan tujuan dari negara donor dalam memberikan bantuan tersebut kepada negara penerima.³² Setiap donor memiliki motivasi yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara penerima. Hal ini yang lebih lanjut melatarbelakangi bentuk bantuan yang diberikan oleh negara donor beserta sasaran dari bantuan itu sendiri.

Setiap negara, dalam memberi atau menerima bantuan luar negeri kepada atau dari negara lain memiliki motivasi yang berbeda-beda. Motivasi dalam bantuan luar negeri juga telah mengalami perubahan secara signifikan dalam lima dekade terakhir. Dalam praktek bantuan luar negeri, motivasi terkoneksi dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh negara pemberi bantuan. Tetapi, banyak juga motivasi lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan tujuan pembangunan

³² Louis A. Picard, *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half Century*. New York: M.E. Sharpe, 2008, hal. 12

tersebut, seperti kebijakan keamanan nasional atau motivasi komersial bagi negara donor.

Fransisco Sagasti, dalam tulisannya yang berjudul *Official Development Assistance: Background, Context, Issues and Prospects*, mengatakan bahwa motivasi suatu negara dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada resipien dapat dilihat dari bentuk bantuan luar negeri yang diberikan dan manfaat yang diperoleh dari bantuan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga motivasi utama yang berperan dalam membentuk kebijakan bantuan luar negeri, yaitu.³³

1. Motivasi solidaritas internasional dan keagamaan (*international solidarity and religious motivations*)

Motivasi ini merupakan motivasi yang menjunjung kewajiban moral negara donor untuk membantu masyarakat miskin di negara berkembang sebagai landsan utamanya. Dasar dari motivasi solidaritas dan keagamaan adalah adanya gagasan bahwa negara kaya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara miskin. Motivasi ini lebih memperhatikan nilai etika, kemanusiaan dan altruisme³⁴ pada prakteknya, seperti:

- Meringankan penderitaan manusia dan memperlihatkan solidaritas sesama manusia

³³ Fransisco Sagasti, "*Official Development Assistance: Background, Context, Issues and Prospects*", Makalah yang disampaikan pada seminar "Improving Official Development Assistance" Amman, Jordania, 10-11 Oktober 2005, diselenggarakan oleh United Nations University and International Leadership Institute, hal. 3.

³⁴ Altruism adalah paham (sifat) yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari egoisme), KBBI V.

- Membantu menanggulangi bencana alam atau bencana kemanusiaan melalui bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan.
- Membangun masyarakat lokal melalui penguatan keahlian, kemampuan dan kompetensi sebagai inisiatif untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

2. Motivasi kepentingan nasional (*narrow and enlightened self interest motivations*)

Motivasi menjaga kepentingan nasional dapat terkait kedalam tiga hal:

A. Kepentingan strategis dan keamanan, dimana pemberian bantuan akan didasarkan pada negara yang memiliki peranan penting secara geopolitik dan strategis bagi negara donor. Hal ini merupakan bentuk respon terhadap pertimbangan geopolitik dan keamanan negara donor.

- Pada level nasional, dengan memberikan bantuan kepada negara berkembang yang memiliki posisi geopolitik yang penting bagi negara donor, sebagai bagian dari *war on terrorism* dan *war on drugs*.
- Pada level regional, mempertimbangkan kepentingan aliansi atau perjanjian regional.

B. Kepentingan politik, dimana bantuan diarahkan agar negara penerima akan memberikan dukungan kepada negara pendonor, terutama jika ada ikatan sejarah antara negara pendonor dengan negara penerima.

Motivasi ini berfokus untuk mendapatkan dukungan politik untuk kebijakan luar negeri atau domestik negara donor.

- Dengan konstituen asing (melalui dukungan kepada bekas negara jajahan dan wilayah lainnya dengan ikatan sejarah khusus dan budaya dengan negara donor, bantuan digunakan untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan secara politik).
- Berpusat kepada konstituen domestik (mendapatkan dukungan dari imigran atau kelompok etnis asing (etnis dari negara resipien) di negara donor).

C. Kepentingan ekonomi dan perdagangan, yang menekankan kepada upaya pembentukan hubungan perdagangan langsung antara negara donor dengan resipien, ekspansi pasar untuk produk barang atau jasa dari negara donor kepada negara penerima dan kegiatan lainnya yang memberikan keuntungan finansial untuk negara donor.

- Keuntungan dapat termasuk perluasan ekspor, memperoleh tenaga kerja di negara resipien, memperoleh dukungan dari produsen domestik di negara resipien (seperti bantuan makanan), memperoleh keamanan investasi yang lebih baik di negara resipien, mengamankan akses sumberdaya alam, mendapatkan akses untuk memperoleh tenaga potensial yang memenuhi syarat (seperti beasiswa pasca sarjana) dan menciptakan permintaan untuk ekspor barang dari negara donor.

3. Motivasi menjaga barang publik internasional (*provision of international public good motivations*)

A. Munculnya masalah global dan regional yang menyangkut negara donor dan negara penerima bantuan dan memerlukan kerjasama untuk menjaga ketersediaan barang publik internasional:

- Menghadapi ancaman lingkungan global dan regional yang menimpa negara maju secara langsung.
- Memberikan penanganan atau solusi terhadap pertumbuhan populasi global, ketidak seimbangan dan ancaman kesehatan (seperti HIV/AIDS).
- Mendukung inisiatif badan internasional untuk menghindari kejahatan publik (kriminal, perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme).

B. Menjaga stabilitas sistem internasional, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dan wilayah tertentu untuk mengamankan stabilitas dunia dan untuk mempercepat kepentingan jangka panjang negara donor:

- Menjaga stabilitas politik dengan mencegah dan menyelesaikan konflik domestik (seperti inisiasi *peace making* dan *peace building*), dan melalui penyebaran demokrasi (*monitoring, supervising elections, penguatan institusi dan praktek demokratis*)

- Menjamin stabilitas ekonomi dunia melalui reformasi kebijakan dan melalui upaya untuk menghindari kekacauan keuangan dan perdagangan internasional (seperti pemberian dana untuk menghapuskan krisis hutang dan bantuan dana untuk menstabilkan harga suatu komoditas).
- Menjaga stabilitas sosial untuk mencegah migrasi internasional (program untuk mengurangi pertumbuhan populasi, melawan kemiskinan, mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan derajat wanita).
- Membantu negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perekonomian dunia (seperti *capacity building* dalam bidang ilmu pengetahuan, inovasi dan produksi) dan dalam kesepakatan internasional untuk membuat negara-negara berkembang menjadi lebih layak, stabil dan efektif (*technical assistance, training negotiators*).

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data eksploratif, yang mana peneliti berusaha mengidentifikasi sebab atau hal yang mempengaruhi suatu fenomena sosial melalui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut.³⁵ Penelitian kualitatif eksploratif juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk menjelajahi dan memahami makna

³⁵ Bernd Reiter, *The Epistemology and Methodology of Exploratory Social Science Research: Crossing Popper with Marcuse*, University of South Florida, 2013, hal. 8

dalam fenomena sosial yang diteliti.³⁶ Penulis menggunakan penelitian ini untuk menganalisis motivasi Tiongkok dalam memberikan bantuan infrastruktur kepada pemerintah Kamboja.

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan untuk menganalisis motivasi bantuan infrastruktur Tiongkok kepada Kamboja ini adalah dari tahun 2004 ketika bantuan pembangunan infrastruktur pertama kali diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada Kamboja sampai tahun 2015 yang merupakan batasan terakhir dari data terbaru yang peneliti peroleh.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek yang perilakunya hendak kita deskripsikan dan jelaskan.³⁷ Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.³⁸ Tingkat analisis adalah hal yang menjadi landasan dalam keberlakuan suatu pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan diatas, unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Tiongkok. Sedangkan unit eksplanasinya adalah Kamboja dengan tingkat analisis pada level negara yakni Tiongkok.

³⁶ Bernd Reiter, 2013, hal. 11

³⁷ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES, 1990, hal. 35

³⁸ Mohtar Mas'oed, 1990, hal. 35

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu yang dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui situs resmi oleh pemerintah Tiongkok dan Kamboja. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs resmi, maupun laporan penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan penelusuran data-data yang telah didapatkan secara mendalam. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif eksploratif dengan mengidentifikasi sebab atau hal yang mempengaruhi suatu fenomena sosial melalui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut dan mencari pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁹ Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas peneliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep motivasi bantuan luar negeri oleh Fransisco Sagasti. Menurut Sagasti, motivasi suatu negara dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada resipien dapat dilihat dari bentuk bantuan luar negeri yang diberikan dan manfaat yang diperoleh dari bantuan

³⁹ Bernd Reiter, 2013, hal. 12

tersebut. Dalam menjelaskan motivasi bantuan luar negeri, Sagasti mengelompokkan motivasi bantuan luar negeri kedalam tiga motivasi utama yang menjadi alasan bagi suatu negara dalam memberikan bantuan luar negerinya secara umum, yaitu: motivasi solidaritas internasional dan keagamaan (*international solidarity and religious motivations*), motivasi kepentingan nasional (*narrow and enlightened self interest motivations*), motivasi menjaga barang publik internasional (*provision of international public good motivations*). Untuk menjelaskan mengenai bantuan luar negeri itu sendiri, peneliti menyimpulkan pengertian bantuan luar negeri yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai bantuan luar negeri karena belum ada pengertian yang tetap mengenai bantuan luar negeri itu sendiri dari para sarjana Ilmu Hubungan Internasional hingga saat ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Karakteristik Bantuan Luar Negeri Tiongkok

BAB ini menjelaskan mengenai konsep bantuan luar negeri secara umum dan konsep bantuan luar negeri yang digunakan oleh Tiongkok beserta prinsip dan karakteristiknya yang menjadikan bantuan luar negeri Tiongkok berbeda dengan

bantuan luar negeri secara umum serta membahas kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok secara keseluruhan.

BAB III Kamboja dan Bantuan Luar Negeri

BAB ini menggambarkan mengenai kondisi Kamboja dan ketergantungan Kamboja terhadap bantuan luar negeri serta kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Kamboja secara khusus.

BAB IV Motivasi Tiongkok dalam Memberikan Bantuan Infrastruktur Kepada Kamboja

BAB ini menganalisis motivasi Tiongkok dalam pemberian bantuan infrastuktur terhadap Kamboja. Motivasi yang berhasil diidentifikasi inilah yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan Tiongkok dalam pemberian bantuan luar negeri terhadap Kamboja, sehingga pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijawab.

BAB V Kesimpulan

BAB ini menyediakan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan dan saran serta kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini.